BAB III

HASIL KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bandung yang merupakan penggabungan dari Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal dengan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, sedangkan Penanaman Modal sendiri berubah menjadi Kantor.

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok sebagaimana Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 adalah : merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi Bina Program, Perdagangan, Perindustrian, Perlindungan Konsumen serta melaksanakan Ketatausahaan Dinas.

Selain melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan fungsi sebagaimana tertuang pada Pasal 28 Peraturan Daerah, yaitu :

a. Pelaksanaan Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaa kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi Bina Program, Perindustrian, Perdagangan serta Perlindungan Konsumen.

b. Pelaksanaan Pelayanan teknis Administrasi Ketatausahaan

Adapun yang menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap sektor Industri dan Perdagangan di Wilayah Kabupaten Bandung
2. Melaksanakan Penilaian dan memberikan masukan terhadap kondisi dan Prasarana penunjang pengembangan Sektor industri dan perdagangan
3. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dalam bidang industri dan perdagangan
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok industri dan perdagangan kecil yang bersifat usaha rumah tangga yang berada di pedesaan-pedesaan.

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 20 untuk kegiatan aparatur memperoleh/ menggunakan anggaran sebesar Rp. 7.594.629.500,00, sedangkan untuk kegiatan publik sebesar Rp. 1.550.000.000,00, yang berasal dari DAU Kabupaten Bandung.

Pada tahun anggaran 2002 kegiatan publik yang telah dilaksanankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Kegiatan pelatihan, bantuan mesin dan peralatan dan bantuan modal untuk pengrajin industri kecil.

2. Kegiatan pengembangan industri jaringan pemasaran, perlindungan konsumen.
3. Kegiatan pengembangan ekspor daerah.
4. Penataan sarana dan prasarana Pasar Lembang.
5. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan relokasi Pedangan Pasar Baleendah dan Ciwidey.

Perkembangan dunia usaha dan Perdangan di wilayah Kabupaten Bandung tidak terlepas dari pengaruh adanya kondisi kritis berbagai bidang yang masih melanda negara kita, walaupun demikian pada kelompok industri dan pedagang kecil mapun menengah relatif lebih tahan terhadap situasi demikian karena mempunyai sifat fleksibel dan dapat mudah berubah arah usaha, tetapi umumnya kelompok industri ini mempunyai permasalahan dalam permodalan, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dalam pemasaran, kurang memiliki akses terhadap informasi teknologi maupun peluang usaha.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelompok industri dan perdangan kecil sehingga diharapkan dapat menggerakkan kembali roda perekonomian pedesaan. Adapun perkembangan pertambahan surat Tanda Daftar Industri yang diterbitkan selama tahun 2002 sebanyak 88 buah dengan investasi sebesar Rp. 8.446.510.000,00 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.222 orang, sedangkan Izin Usaha Industri (IUT) sebanyak 39

buah dengan nilai investasi sebesar Rp. 71.056.400.000,00 dan menyerap tenaga kerja 6.594 orang.

Dari sektor Perdangan selama tahun 2002 telah diterbitkan:

a. Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP) sebanyak 1.686 buah yaitu SIUP PK, sebanyak 1478 buah, SIUP PM sebanyak 168 buah dan SIUP PB sebanyak 40 buah.
b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 1.043 buah, yaitu SITU baru 803 buah dan SITU Herregistrasi 240 buah.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 1.885 buah terdiri dari TDP Baru 1346 buah dan TDP Herregistrasi 539 buah.
d. Tanda Daftar Gudang (TDG) sebanyak 42 buah.
e. Jumlah izin pemakai kios/ lapangan sebanyak 4.434 buah, sedangkan untuk penerbitan MCK sebanyak 27 unit 81 pintu.

Selama tahun 2002 realisasi penerimaan retribusi Dinas Perindustrian dan Perdangan sebanyak Rp. 3.508.787.450,00 dari target Rp. 3.870.000.000,00 (90,67%).

3.2 VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

   Terwujudnya industri dan perdangan yang tangguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mendukung sarana dan prasarana pemasaran yang representatif berdasarkan nilai agamis, kultural dan berwawasan lingkungan.

2. Pernyataan Misi

1) Kompetensi aparatur dalam memfasilitasi perkembangan industri dan perdangan.

2) PADS melalui pertumbuhan industri dan perdagangan.

3) Meningkatkan perdangan barang dan jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbyhan ekonomi regional daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah, pesaingan sehat, perlindungan konsumen dan pemberdayaan sistem ekonomi kerakyatan.

4) Mengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

a) Tujuan

(1) Peningkatan kemampuan pengusaha yang bergerak di sektor industri mapun perdagangan agar mampu bersaing di dalam dan luar negeri.

(2) Peningkatan kemampuan dan keahlian aparat agar mampu membina dalam sektor industri dan perdaganga.

(3) Pemberdayaan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalar rangka kesejahteraan masyarakat.

(4) Meningkatkan upaya ilkim yang kondustif.

(5) Meningkatkan sarana dan prasarana pemasaran hasil industri dan dagang.

b) **Sasaran**

(1) Pembinaan bagi pengusaha industri dan perdagangan yang berpotensi untuk berkembang.

(2) Tersedianya data/ informasi potensi industri dan dagang secara akurat dan lengkap.

(3) Meningkatkannya produktivitas dan efesiensi para pengrajin industri kecil di sentra-sentra dan pedagang informal di Kabupaten Bandung.

(4) Terwujudnya tempat pemasaran hasil produk industri.

(5) Terselenggaranya kegiatan promosi dagang hasil industri baik di dalam negeri maupun luar negeri.

3.4 PROGRAM KERJA RUTIN

Untuk mendukung kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pada sektor industri dan perdagangan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2002, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Izin di bidang usaha industri dan perdagangan sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan..
2. Pembinan terhadap industri dan pedagang kecil/menengah
3. Pengelolaan data industri dan perdagangan.
4. Promosi dan pameran-pameran hasil industri.
5. Peningkatan kemampuan aparat pembina dengan melalui pendidikan dan latihan baik penjenjangan maupun non-penjenjangan.

6. Penambahan saran prasarana atau peralatan inventaris untuk 10 UPTD.
7. Penggajian pegawai dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
8. Peningkatan disiplin pegawai & Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

3.5 PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN

Selain kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga dilaksanakan kegiatan kepada para pengusaha industri dan perdagangan, adapun jenis kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan, bantuan mesin dan peralatan dan bantuan modal ntuk pengrajin industri kecil.
2. Kegiatan pengembangan distribusi jaringan pemasaran, perlindungan konsumen.
3. Kegiatan pengembangan ekspor daerah.
4. Penataan sarana dan prasarana Pasar Lembang.
5. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan relokasi pedagang Pasar Baleendah dan Ciwidey.

3.6 STRUKTUR ORGANISASI

Lingkungan ukuran, teknologi, sasaran, dll berpengaruhsimultan terhadap struktur organisasi (banyak bagian sentralisasi, formalisasi, dll). Struktur Organisasi secara keseluruhan digambarkan pada *Organigram* (Skema

Organisasi). 4 komponen dasar yang digambarkan oleh struktur organisai sebagai berikut :

1. Pembagian tugas / tanggung jawab pada individu / bagian.
2. Hubungan pelaporan resmi, hirarki, rentang kendali.
3. Pengelompokan individu adalah bagian dari organisasi.
4. Sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integrasi, vertikal, maupun horizontal.

3.7 Aktivitas Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan penulis mengerjakan dalam segala hal yang menyangkut dengan masalah ke tatatusahaan dengan menggunakan komputer. Tugas rutin sehari-hari selama praktek kerja lapangan yaitu mengerjakan kegiatan tata usaha dengan menggunakan program komputer guna membantu kelancaran tatausaha seperti *Pengkajian Kegiatan Koordinasi Wilayah,* merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi Bina Program, Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen serta melaksanakan Ketata Usahaan Dinas.